

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara terbesar ketiga setelah Cina dan India, yang memproduksi beras terbanyak di dunia, meskipun Indonesia masih tetap perlu mengimpor beras hampir setiap tahun (walau biasanya hanya untuk menjaga tingkat cadangan beras). Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi per kapita beras yang besar (oleh populasi yang besar).Indonesia memiliki salah satu konsumsi beras per kapita terbesar di seluruh dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tercatat hampir 150 kilogram (beras, per orang, per tahun) pada tahun 2017. Hanya Myanmar, Vietnam, dan Bangladesh yang memiliki konsumsi beras per kapita yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Angka dalam *unmilled* oleh para petani kecil, bukan oleh perusahaan besar yang dimiliki swasta atau negara. (Asia & Internasional, 2020)

Para petani kecil berkontribusi sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia. Setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar. Mengingat bahwa populasi Indonesia mengkonsumsi beras dalam kuantitas besar, dan mengingat resiko dari menjadi importir beras saat harga bahan-bahan makanan naik (yang membebani rumah tangga miskin). Mereka menghabiskan lebih dari setengah dari total pengeluaran mereka untuk bahan-bahan makanan), Indonesia menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai swasembada beras. Indonesia memiliki niat untuk menjadi eksportir beras. Selama beberapa dekade Indonesia telah berjuang untuk mencapai swasembada beras namun hanya berhasil di pertengahan 1980an dan 2008-2009 (Asia & Internasional, 2020).

Pemerintah Indonesia menggunakan dua cara untuk mencapai swasembada beras. Pada satu sisi, pemerintah mendorong para petani untuk meningkatkan produksi mereka dengan mendorong inovasi teknologi dan menyediakan pupuk bersubsidi, dan di sisi lain, berusaha mengurangi konsumsi beras masyarakat melalui kampanye seperti "satu hari tanpa beras" (setiap minggunya), sementara mempromosikan konsumsi makanan-makanan pokok lainnya. Strategi ini untuk

sebagian menjadi sukses. Walaupun kebanyakan orang Indonesia menolak untuk mengganti beras dengan bahan-bahan makanan lain, memang produksi beras naik cukup tajam setelah tahun 2014, didukung oleh upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur sawah (irigasi) (Asia & Internasional, 2020).

Pada beberapa tahun terakhir Indonesia perlu mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Thailand dan Vietnam, untuk mengamankan cadangan beras negara. Impor ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Badan ini memiliki monopoli untuk impor dan ekspor beras, mengatur proses distribusi dan menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Bulog biasanya menjaga cadangan beras antara 1,5 ton sampai 2 ton melalui membeli beras dari penghasil-penghasil domestik dan eksportir-eksportir asing.(Asia & Internasional, 2020)

Jumlah penduduk Riau pada tahun 2017 sebanyak 6.657,911 jiwa, dengan kebutuhan beras dengan konsumsi mencapai 763.063 ton/tahun. Dengan jumlah produksi yang hanya mencapai 234.357 ton beras, artinya Provinsi Riau masih defisit beras 528.706 ton. Luas lahan padi yang bekurang terlihat pada data luas panen yang cenderung turun sejak tahun 2013. Luas lahan panen pada tahun 2013 mencapai 118.518 ha, turun menjadi 106.037 ha pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 mencapai 95.176 ha berdasarkan ARAM 11 BPS Riau. Tingkat produktivitas padi di Riau pada tahun 2017 sebesar 39,25 kuintal/hektar(Antara, 2021)

Sementara itu produksi padi sawah di Provinsi Riau itu sendiri dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Produksi padi Sawah di Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Tahun	Produksi padi (Ton)
1	2014	385,475
2	2015	393,917
3	2016	373,536
4	2017	365,744
5	2018	391,132

Sumber:Badan Pusat Statistik Riau

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa produksi padi sawah dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami kenaikan jumlah produksi sebesar 0,02%. Pada tahun 2016 sampai 2017 produksi padi sawah mengalami penurunan sebesar 0,02%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan produksi padi sawah sebanyak 0,06%.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu sentra produksi padi diprovinsi Riau. Berikut ini produksi padi sawah di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 2. Produksi Padi Sawah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013-2017

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	2013	5.462	26.748,21
2	2014	5.567	35.470,98
3	2015	3.785	26.378,05
4	2016	2.923	18.488,83
5	2017	3.704,5	21.010,47

Sumber: Direktorat Jendral Holtikultural, (2018)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah luas tanam sebesar 0,02% dan diikuti kenaikan jumlah produksi sebesar 0,32%. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan luas tanam sebesar 0,22% dan diikuti penurunan jumlah produksi sebesar 0,29%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan luas tanam sebesar 0,26% dan diikuti kenaikan jumlah produksi sebesar 0,13%.

Tabel 3. Produksi Padi Sawah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Tanam(Ha)	Produksi(Ton)
1	Rambah	736	5.321,80
2	Rambah Samo	1.548	8.887,56
3	Ujung Batu	50	247,02
4	Rokan IV Koto	334,5	1.530,34
5	Kunto Darussalam	-	-
6	Tambusai	50	231,85
7	Kepenuhan	45	59,48
8	Tambusai Utara	-	-
9	Rambah Hilir	490	2.767,17
10	Bangun Purba	414	1.803,31
11	Tandun	-	-
12	Kabun	-	-
13	Pagaran Tapah Ds	-	-
14	Bonai Darussalam	-	-
15	Pendalian IV Koto	-	-
16	Kepenuhan Hulu	37	161,95
	Total	3.70,45	21.010,48

Sumber: *Direktorat Jendral Holtikultura, (2018)*

Produksi tertinggi tahun 2017 terdapat di Kecamatan Rambah Samo 8.887 ton gabah kering giling (GKG). Hal ini dikarenakan luas tanam yang sangat tinggi dibandingkan di Kecamatan lain yang mencapai 1.548 ha. Sedangkan produksi terendah terdapat di Kecamatan Kepenuhan 59,48 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas tanam 45 ha (Direktorat Jendral Holtikultura, 2018).

Rokan Hulu masih mendapatkan pasokan beras dari Palembang, Sumatera Barat dan Sumatra Utara, dikarenakan stok beras belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Harga beras asal sumut, seperti CML Rp108 ribu per 10 kg, beras jenis kuku balam 120 ribu per 10 kg. Untuk beras dari Palembang seperti Beras merek Topi Koki, Rp. 123 ribu per 10 kg, Beras jenis Mawar Rp. 125 ribu per 10 kg. Beras Anak Daro dari Sumatera Barat Rp. 125 ribu per 10 kg (Riauin.com, 2021)

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Rokan Hulu, Mubrizal, harga beras cenderung stabil. Hal itu sesuai pantauan dinas dipasar Okak Rambah Samo, Dalu-dalu Tambusai, Pasar kota Tengah kepenuhan, Pasar Ujung Batu, Tandun dan Pasar Kabun. Sesuai pantauan harga beras dilakukan Tim Gabungan melibatkan Dinas TPH Rokan Hulu, serta Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Rokan Hulu, Harga beras di pasaran sekitar Rp 10 ribu hingga rp. 12 ribu per Kg. (riautekini.com, 2021)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa harga beras hasil produksi Kabupaten Rokan Hulu lebih tinggi dibandingkan harga beras dari luar wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**DAYA SAING KOMODITAS BERAS DI KABUPATEN ROKAN HULU**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keunggulan komparatif komoditas beras di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana keunggulan kompetitif komoditas beras di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menilai Keunggulan Komparatif Komoditas Beras di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menilai Keunggulan Kompetitif Komoditas Beras di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, hasil analisis dampak kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan instrumen-instrumen kebijakan yang lebih efektif dan efisien bagi pengembangan agribisnis beras di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui posisi daya saing saat penelitian ini dilakukan terhadap peningkatan komoditas Beras di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Dapat digunakan sebagai titik untuk melakukan penelitian sejenis dalam bahasan kebijakan pemerintah yang berkaitan terhadap daya saing komoditas beras sebagai referensi atau bahan rujukan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Jakiah et al., (2016) dengan judul “Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Tani Beras Organik di Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (*Private Cost Ratio*) dan komparatif (*Domestic Resource Cost Ratio*). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik

Rahmi et al., (2013) dengan judul “Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Teh (Studi Kasus: Ptpn Viii Afdeling Rancabali Iii)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa pengaruh kebijakan pemerintah, peningkatan harga output, peningkatan harga pupuk anorganik serta penurunan produksi terhadap daya saing teh hitam orthodox pada PTPN VIII Afdeling Rancabali III. Metode yang digunakan adalah Matriks Analisis Kebijakan dan analisis sensitivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa kebijakan pemerintah, harga output, harga pupuk anorganik dan jumlah produksi teh hitam orthodox mempengaruhi daya saing usahatani teh hitam orthodox di PTPN VIII Afdeling Rancabali III.

Sukmaya et al., (2017) dengan judul “Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai Vs Pengusahaan Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur”. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis tingkat keuntungan ekonomi dan keuangan usaha tani,

menganalisis status daya saing kedelai, menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing kedelai di lamongan, jawa timur, dan menganalisis sensitivitas pada daya saing kedelai domestik. Dalam penelitian ini menggunakan analisis matriks kebijakan atau *Policy Analysis Matriks* (PAM), hasil analisis ini dipakai untuk melihat dua dasar indikator mengukur daya saing, biaya rasio privat (PCR yakni *Private Cost Ratio*) adalah sebuah keunggulan kompetitif, sumber daya domestik biaya rasio (DRCR atau *Domestic Resource Cost Ratio*) adalah sebuah keunggulan komparatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan komoditas kedelai Syahrul Ganda Sukmaya, Dwi Rachmina, dan Saptana 22 di Kabupaten Lamongan tidak menguntungkan dan tidak efisien secara finansial dan ekonomi. Berdasarkan indikator daya saing yaitu PCR dan DRCR, menunjukkan bahwa sistem usahatani kedelai di Kabupaten Lamongan tidak memiliki daya saing. Nilai koefisien $PCR > 1$ dan $DRCR > 1$. Hal ini berarti sistem usahatani kedelai tidak kompetitif dan tidak efisien. Berdasarkan indikator transfer input, menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kebijakan subsidi terhadap input pupuk. Berdasarkan indikator dampak divergensi kebijakan pemerintah terhadap input-output usahatani kedelai menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang ada merugikan usahatani kedelai di Kabupaten Lamongan. Perubahan di harga kedelai domestik sebesar 15 dan 20 persen meningkatkan daya saing kompetitif kedelai domestik.

Setiawan et al., (2014) dengan judul “Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa Di Kabupaten Kupang”. Penelitian ini bertujuan menganalisis profitabilitas finansial dan ekonomi, keunggulan kompetitif dan komparatif pada komoditas kelapa di Kabupaten Kupang. Metode penelitian yang digunakan sebagai indikator dalam menganalisis daya saing adalah metode deskriptif dengan menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan (1) usahatani kelapa di Kabupaten Kupang tidak memiliki keunggulan kompetitif dilihat dari nilai PP yang negatif dan PCR yang lebih besar dari satu. Namun memiliki keunggulan komparatif dilihat dari nilai SP yang positif dan DRC yang lebih kecil dari satu; (2) Komoditas kelapa

di Kabupaten Kupang berdaya saing sedang dan masih dapat dikembangkan, salah satunya dengan cara meningkatkan nilai tambah dari pengolahan kelapa

Mega, (2017) dengan judul “Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Komoditas Bawang Merah Di Kabupaten Kediri”. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sentra produksi bawang merah. Pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2013. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan terhadap pedagang input pertanian, kelompok tani, lembaga pemasaran dan lembaga penunjang secara purposive serta pengambilan sampel terhadap petani yang dilakukan dengan teknik purposive random sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis Policy Analysis Matrix (PAM) untuk mengukur tingkat daya saing melalui indikator keunggulan komparatif dan kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah pada suatu sistem komoditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani komoditas bawang merah di Kabupaten Kediri memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang merupakan indikator daya saing. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai keuntungan privat dan sosial yang bernilai positif yaitu Rp 89.460.767,00 dan Rp 63.699.585,00 per hektar serta nilai *Private Cost Ratio* (PCR) dan *Domestic Resources Cost Ratio* (DRC) yang lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,29 dan 0,42. Dengan demikian, komoditas bawang merah di Kabupaten Kediri memiliki peluang ekspor yang cukup besar serta mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari produk impor yang ada di dalam negeri maupun komoditas sejenis di manca negara ketika dilakukan kegiatan ekspor. Kebijakan pemerintah terhadap input-output pada sistem komoditas bawang merah di Kabupaten Kediri telah melindungi petani secara efektif, sehingga kebijakan pemerintah terhadap input-ouput mampu mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing komoditas bawang merah di Kabupaten Kediri. Hal ini terlihat dari nilai transfer bersih yang bernilai positif yaitu Rp 25.761.183,00 per hektar serta *Effective Protection Coefficient* (EPC) sebesar

1,14, nilai *Profitability Coefficient* (PC) sebesar 1,40 dan nilai *Subsidy Ratio to Producers* (SRP) sebesar 0,22.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Daya Saing

Murtiningrum,(2013)menyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan. Daya saing suatu komoditi dapat diukur melalui dua pendekatan yang berbeda. Kedua pendekatan tersebut adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi perusahaan komoditi.

Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu Pendekatan pertama adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan. keuntungan privat dan keuntungan sosial. Pendekatan ini pun dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Dari sisi permintaan, kemampuan bersaing mengandung arti bahwa produk agribisnis yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut konsumen atau produk yang dipersepsikan bernilai tinggi oleh konsumen (consumers's value perception). Sementara dari sisi penawaran, kemampuan bersaing berkaitan dengan kemampuan merespons perubahan atribut-atribut produk yang dituntut oleh konsumen secara efisien.

2.2.2. Keunggulan Kompetitif

Buku yang berjudul "*The Tompetitive Advantage of Nations*" Michael E. PorterMurtiningrum, (2013) menawarkan konsep keunggulan kompetitif sebagai salah satu bentuk penyempurnaan ataupun tandingan atas konsep sebelumnya yaitu keunggulan komparatif. Porter menekankan lima faktor didalam mencapai keunggulan kompetitif, yang dikenal sebagai penyumbang atas kegiatan inovasi yaitu *new technologies, new or shifting buyer needs, the emerge of a new industrial segment, shifing input cost or availability, changes in government regulations.*

Keunggulan kompetitif terkait erat dengan faktor penentu daya saing di tingkat perusahaan khususnya perusahaan yang beroperasi di negara maju. Sementara keunggulan komparatif lebih menekankan pada 12 sisi alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi untuk membangun daya saing tidak cukup dilakukan di tingkat makro saja namun perlu didukung oleh penguatan pada sisi mikro.

Negara atau daerah yang memiliki keunggulan sumber daya alam melimpah dan tenaga kerja yang banyak, belum tentu memiliki keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan tidak terdapat korelasi positif antara keunggulan sumberdaya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh sebuah negara dengan keunggulan kompetitif.

Keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh empat faktor, yaitu keadaan faktor-faktor produksi, permintaan dan tuntutan mutu, industri terkait dan pendukung yang kompetitif dan strategi, struktur serta sistem penguasaan antar perusahaan. Selain dari empat faktor penentu tersebut, keunggulan kompetitif juga ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu sistem pemerintahan dan terdapatnya kesempatan.

2.2.3. Keunggulan Komparatif

Kurniawan dalam Salma,(2018)menyatakan bahwa keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu wilayah atau negara dalam memproduksi satu unit dari beberapa komoditas dengan biaya yang relatif lebih rendah dari biaya imbalan sosialnya dari alternatif lainnya. Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan suatu negara untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia. dari definisi tersebut, terlihat bahwa biaya produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat harga di pelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan.

Dengan demikian, analisis keunggulan komparatif adalah analisis ekonomi (*social*) dan bukan analisis finansial (*private*). Oleh karena itu baik harga input maupun harga output dihitung dengan menggunakan komponen subsidi maupun pajak yang mungkin terkandung dalam harga aktual di pasar (harga finansial).

Dalam analisis ekonomi yang diperhatikan adalah hasil total, produktivitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumberdaya yang dipakai dalam proyek (proses produksi) untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan siapa-siapa yang menerima hasil dari proyek tersebut

Keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing potensial yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditi yang efisien secara ekonomi dalam pengusaannya, menunjukkan bahwa komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian keunggulan komparatif merupakan alat untuk mengukur keuntungan sosial dan dihitung berdasarkan harga sosial dan harga bayangan nilai tukar uang.

2.2.4 Policy Analysis Matrix (PAM)

Menurut person dalam Herlina (2017) mengatakan terdapat tiga tujuan utama dari metode PAM, pertama yaitu memberikan informasi dan analisis untuk membantu dalam pengambilan kebijakan pertanian yang berkaitan dengan sebuah sistem usaha tani apakah memiliki usahatan apakah memiliki daya saing pada teknologidan tingkat harga yang ada atau tidak, mengetahui dampak infestasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur terhadap tingkat efesiensi usahatani, dampak investasi baru dalam bentuk riset teknologi pertanian terhadap tingkat efesiensi usahatani. Sebuah tabel PAM untuk suatu usahatani memungkinkan seseorang untuk menghitung keuntungan privat.tujuan kedua dari analisis PAM adalah menghitung tingkat keuntungan sosial usahatani dengan cara menilai output dan biaya pada tingkat harga efesiensi (*Social Opportunity Cost*). Tujuan ketiga adalah menghitung transfer efek sebagai dampak dari sebuah kebijakan, dengan membandingkan keuntungan dan biaya sebelum dan sesudah penerapan kebijakan.

Menurut Pearson dalam Panjaitan (2017) beberapa indikator hasil analisis dari matriks PAM sebagai Berikut :

1. Harga Privat (*Privat Cost*)

Harga privat (*privat cost*) yaitu harga yang benar-benar diterima produsen dan konsumen atau harga yang terjadi setelah adanya kebijakan.

2. Keuntungan Privat (*Private Profitability*)

Keuntungan Privat (*Private Profitability*) $D = A - (B+C)$ yaitu merupakan indikator daya saing dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output dan biaya input. Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi atau menciptakan pasar baru, kecuali apabila sumber daya terbatas atau adanya komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.

3. Keuntungan Sosial (*Social Profitability*)

Keuntungan Sosial (*Social Profitability*) $H = E - (F+G)$ yaitu merupakan indikator keuntungan komparatif dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi, baik akibat kebijakan pemerintah maupun disortasi pasar. Apabila $H > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal.

4. Transfer Output

Transfer Output, $I = A-E$ adalah selisih antara penerimaan yang dihitung atas dasar harga privat (finansial) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. Jika $I > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) ke produsen, demikian juga sebaliknya.

5. Transfer Input

Transfer Input, $J = B - F$ yaitu selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan dengan harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan dengan harga sosial. Jika nilai $TI > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input tradable.

6. Transfer Faktor

Transfer Faktor atau *factor transfer*, $K = C - G$ merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan. Nilai $TF > 0$, berarti adanya transfer dari petani produsen input non tradable, demikian sebaliknya.

7. Transfer Bersih

Transfer Bersih atau *Net Transfer*, $L = D - H$ adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen (privat) dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input-output, demikian sebaliknya.

8. Rasio Biaya Privat

Rasio Biaya Privat atau *Private Cost Ratio* $PCR = C/(A-B)$ merupakan indikator profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Sistem bersifat kompetitif jika $PCR < 1$. Semakin kecil nilai PCR berarti semakin kompetitif.

9. Rasio Biaya Input Non Tradable

Rasio Biaya Input Non Tradable atau *Domestic Resource Cost Ratio*,

$DRCR = G/(E-F)$ merupakan indikator keunggulan komparatif, menunjukkan jumlah sumber daya domestik yang dapat dihemat menghasilkan satu unit devisa. Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika $DRCR < 1$. Semakin kecil nilai DRCR berarti sistem semakin efisien dan mempunyai keunggulan komparatif makin tinggi.

10. Koefisien Proteksi Output Nominal

Koefisien Proteksi Output Nominal atau *Nominal Protection Coefficient on Output* $NPCO = A/E$ yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 . Semakin besar nilai NPCO berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap output.

11. Koefisien Proteksi Input Nominal

Koefisien Proteksi Input Nominal atau *Nominal Protection Coefficient on Input* $NPCI = B/F$ yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap input pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1 . Semakin besar nilai NPCI berarti adanya kebijakan subsidi

tradable. Sebaliknya jika $NPCI > 1$, maka pemerintah menaikkan harga input asing dipasar domestik diatas harga efesiensinya (harga dunia). Akibatnya biaya produksi menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

12. Koefisien Protektif Efektif

Koefisien Protektif Efektif atau *Efective Protection Coefficient*, $EPC = (A-B)/(E-F)$ yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai $EPC > 1$. Semakin besar nilai EPC semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas pertanian domestik.

13. Koefisien Keuntungan

Koefisien Keuntungan atau *Profitability Coefficient* $PC = D/H$, adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika $PC > 1$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan intensif kepada produsen, demikian sebaliknya.

14. Subsidi Rasio Bagi Produsen

Subsidi Rasio Bagi Produsen atau *Subsidy Ratio to Producer*, $SRP = L/E$ adalah subsidi rasio bagi produsen yang diperoleh dari hasil pembagian antara *Net Transfer* (L) dengan penerimaan harga sosial (E). Jika SRP negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berlaku selama ini menyebabkan petani padi sawah mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosialnya, demikian sebaliknya

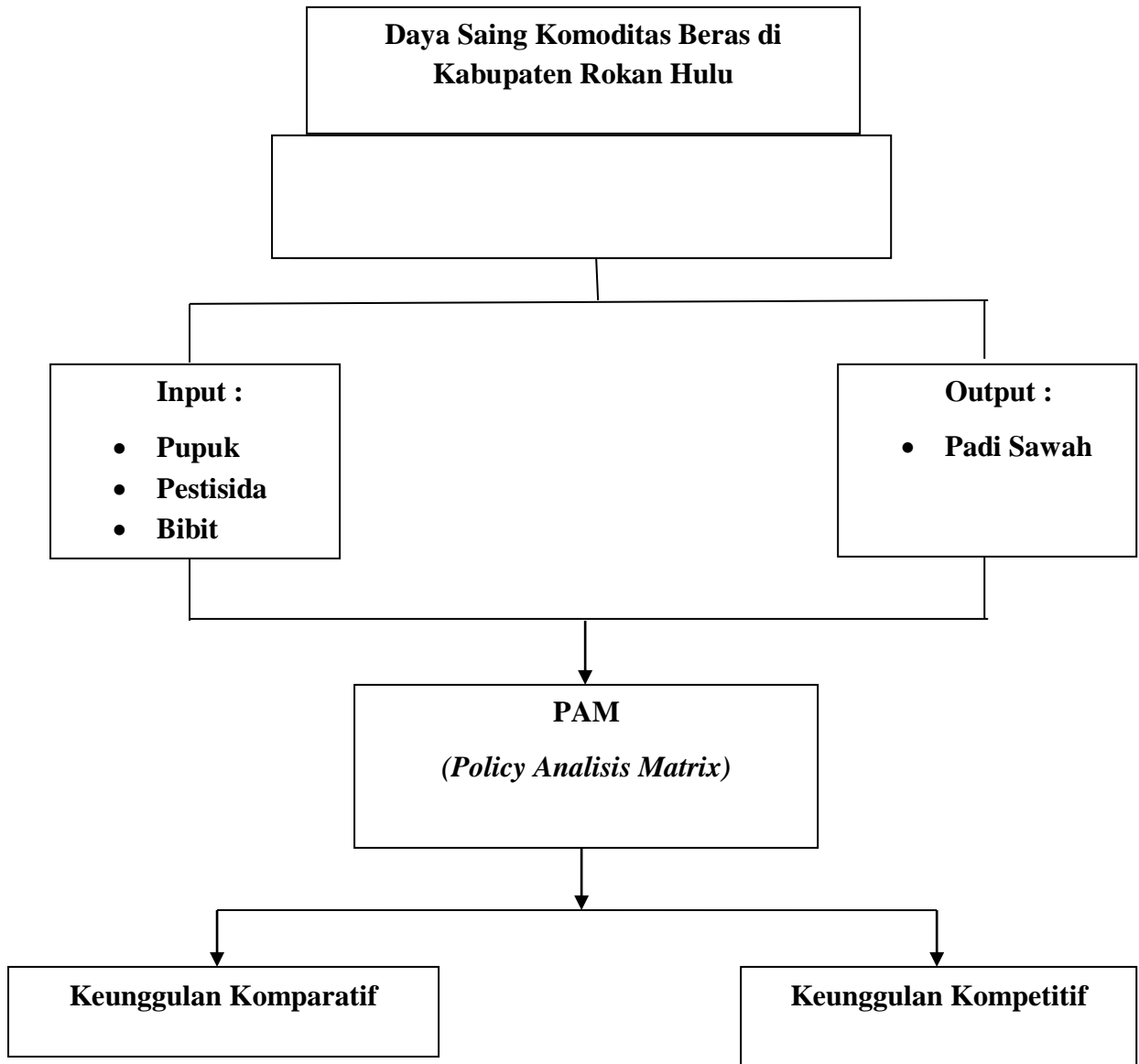
2.2.5 Kerangka Pemikiran

Peran penting Beras dalam perekonomian indonesia memunculkan beberapa ide yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh pemerintah terhadap arah kebijakan yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan usahatani komoditas Beras. Kebijakan pemerintah terhadap input berkaitan dengan kebijakan harga pupuk, bibit dan obat-obatan seperti pestisida, sebaliknya tidak adanya kebijakan input oleh pemerintah maka perlakuan terhadap harga akan mengikuti arus harga internasional (pasar bebas). Jika pada kebijakannya tepat dalam pengembangan usahatani ini, maka akan menimbulkan keunggulan kompetitif dan komperatif

yang didasari dengan kebijakan input dan output. Input dalam kebijakannya berkaitan dengan harga pupuk yang dikeluarkan dari pemerintah, sedangkan output adalah hasil dari input tersebut yang berupa padi sawah. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan harga input lebih rendah maka, akan dapat menurunkan biaya produksi, tapi jika sebaliknya, ketika pemerintah tidak melakukan kebijakan harga input pada tingkat seharusnya, maka akan menimbulkan kosekuensi terkait dengan meningkatnya biaya produksi.

Input dan output akan menjadi daya ukur daya saing dari keunggulan komparatif, sedangkan pada keunggulan kompetitif dapat diukur pada pendapatan serta penerimaan petani. Jika pendapatan dan penerimaan usahatani Beras dibarengi dengan kebijakan input dari pemerintah maka usahatani dalam komoditi Beras maka akan memiliki keunggulan kompetitif. Maka sebaliknya jika pendapatan dan penerimaan usahatani tidak dibarengi dengan kebijakan input dari pemerintah maka usahatani dalam komoditas Beras akan memiliki keunggulan kompetitif atau tidakmemiliki keunggulan kompetitif. Pada peranan keduanya maka letak arah kebijakan tentunya dapat dilihat sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan ataupun menetapkan instrumen suatu kebijakan perusahaan komoditas Beras.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Keterangan :

- ❖ Garis Hubungan : —
- ❖ Garis Pengaruh : →

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian dipilih sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentra produksi beras yang ada di Provinsi Riau. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Desember 2020 sampai April 2021.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini diperoleh dari jenis data penelitian kualitatif, yaitu mendalam, jelas dan spesifik. Maka pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Multi-Stage Sampling*. Tahap pertama, penentuan wilayah lokasi penelitian yaitu Kabupaten Rokan Hulu. Tahap kedua, pengambilan sampel wilayah yang diambil adalah Kecamatan Rambah Samo dengan produksi padi tertinggi, Kecamatan Rokan IV Koto dengan produksi sedang dan Kecamatan Kepenuhan produksi terendah. Kecamatan Rambah Samo terdapat 1.290 petani, Rokan IV koto 568 petani, dan Kepenuhan 62 petani. jika diakumulasikan dari 3 kecamatan itu berjumlah 1.920 petani. Tahap ketiga, sampel diambil dari masing-masing wilayah dengan tehnik Sempel Random Sampling. (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu 2018).

Jumlah populasi ditentukan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

e^2 = Persen kelonggaran akibat kesalahan pengambilan sampel yang ditolelir, dalam penelitian ini kesalahan pengambilan sampel 10%

Maka besarnya sampel adalah:

$$n = \frac{1.920}{1 + 1.920 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{1.920}{1 + 19,2}$$

$$n = \frac{1.920}{20,2}$$

$$n = 95$$

Dengan tingkat presisi (10%) dari jumlah petani yang ada, peneliti menggunakan sampel yang bisa mewakili jumlah keseluruhan petani tersebut yaitu sebanyak 95 petani. Jumlah sampel pada setiap kecamatan menggunakan rumus:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

- n_i = Jumlah sampel petani padi sawah
- N_i = Jumlah sampel petani padi sawah di tiap kecamatan
- n = Jumlah sampel yang ditentukan
- N = Jumlah populasi

Tabel 4. Poposional Sampel Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Sampel
1	Rambah Samo	64
2	Rokan IV Koto	28
3	Kepenuhan	3
	Total	95

Sumber :Data Olahan (2021)

3.4 Metode Analisis Data

Policy Analysis Matrix(PAM) terdiri dari tiga baris dan empat kolom. Baris pertama menjelaskan permintaan, biaya, dan keuntungan atau kegagalan pasar terjadi pada output dan input. Pehitungan keuntungan pada baris ini

bermanfaat untuk menganalisis daya saing komoditas pada keunggulan kompetitif, sedangkan baris kedua menjelaskan nilai sosial terjadi pada kondisi kebijakan atau kegagalan pasar tidak terdapat pada harga output dan input. Kondisi ini digunakan untuk mengestimasi keunggulan komparatif atau ekonomi. Baris ketiga adalah selisih baris pertama dan kedua yang merupakan efek divergensi dari harga privat dan sosial. Efek ini menjelaskan bahwa adanya kebijakan dapat menyebabkan harga privat dan sosial pada suatu komoditas berbeda. Kolom pada matriks PAM terdiri dari kolom penerimaan, kolom biaya dan kolom keuntungan. Pada kolom biaya dibedakan atas dua komponen, yaitu biaya untuk input tradable dan input non tradable.

Tabel 5. Matrik Analisis Kebijakan (*policy Analysis Mantrix*)

Uraian	Penerimaan Output	Biaya Tradable	Input	Faktor Domestik	Keuntungan
Harga Privat	A	B		C	D
Harga Sosial	E	F		G	H
Dampak Kebijakan	I	J		K	L

Sumber : Data Olahan (2021)

Keterangan :

A = Penerimaan Privat	G = Biaya Non Tradable Sosial
B = Biaya Input Tradable	H = Keuntungan Sosial
C = Biaya Input Non Tradable	I = Transfer Output
D = Keuntungan Privat	J = Transfer Input Tradable
E = Keuntungan Sosial	K = Transfer Faktor
F = Biaya Input Tradable Sosial	L = Laba Bersih

Dengan perhitungan menggunakan metode PAM adalah sebagai berikut:

- Keuntungan Privat (D) = (A) - (B+C)

Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi atau

menciptakan pasar baru, kecuali apabila sumber daya terbatas atau adanya komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.

2. Keuntungan Sosial (H) = (E) – (F+G)

Apabila $H > 0$, berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal.

3. Transfer Output (I) = (A) - (E)

Jika $I > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) ke produsen, demikian juga sebaliknya.

4. Transfer Input (J) = (B) – (F)

Jika nilai $TI > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input tradable.

5. Transfer Faktor (K) = (C) – (G)

Nilai $TF > 0$, berarti adanya transfer dari petani produsen input non tradable, demikian sebaliknya.

6. Transfer Bersih (L) = (D) – (H)

Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input-output, demikian sebaliknya.

7. Rasio biaya privat (PCR) = $C / (A-B)$

Sistem bersifat kompetitif jika $PCR < 1$ semakin kecil nilai PCR berarti semakin kompetitif.

8. Rasio biaya sumber daya domestik (DRCR) = $G / (E-F)$

Sistem mempunyai keunggulan komperatif jika $DRCR < 1$. Semakin kecil nilai DRCR berarti sistem semakin efisien dan mempunyai keunggulan komperatif makin tinggi.

9. Koefisien proteksi output nominal (NPCO) = A / E

Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 . Semakin besar nilai NPCO berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap output.

10. Koefisien proteksi Input nominal (NPCI) = B / F

Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1 . Semakin besar nilai NPCI berarti adanya kebijakan subsidi tradable. Sebaliknya jika NPCI > 1 , maka pemerintah menaikkan harga input asing dipasar domestik diatas harga efisiensinya (harga dunia).

11. Koefisien proteksi efektif (EPC) = $(A-B) / (E-F)$

Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai EPC > 1 . Semakin besar nilai EPC semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas pertanian domestik.

12. *Profitability Coefficient*, $PC = D / H$

Jika PC > 1 , berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan intensif kepada produsen, demikian sebaliknya.

13. *Subsidy ratio to producer*, $SRP = L / E$ atau $(D-H) / E$

Jika SRP negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berlaku selama ini menyebabkan petani padi sawah mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosialnya, demikian sebaliknya.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat beberapa defenisi:

1. Input adalah jumlah bayangan pemasukkan yang digunakan usahatani padi sawah terdiri dari pupuk, lahan
2. Harga bayangan input merupakan harga untuk input tradable (input yang diperdagangkan dipasar internasional) dan input tradable atau faktor domestik (input yang diproduksi melalui kebijakan pemerintah yang diukur dari harga privat dan harga sosial)
3. Harga input tradable (pasar internasional) tidak melalui kebijakan pemerintah adalah harga yang didapatkan dari pasar bebas untuk pemasukkan usaha tani beras yang diukur dari harga privat dan harga sosial.

4. *Input tradable* adalah produksi yang dapat diperdagangkan secara internasional (pupuk Urea, Sp-36, Phonska, benih dan pestisida).
5. *Input non tradable* adalah (input domestik) yaitu input yang tidak diperdagangkan sehingga tidak memiliki harga pasar internasional (lahan, tenaga kerja dan pupuk organik)
6. Harga privat merupakan harga tingkat rill yang diterima petani dalam penjualan pembelian faktor produksi yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).
7. Harga sosial adalah harga bayangan atau harga internasional dari produksi beras yang digunakan petani baik input tradable maupun faktor produksi (Rp).
8. *Output* yaitu suatu komoditi (barang) yang dihasilkan dari produksi yaitu Beras
9. Input dalam kebijakan pemerintah atau input tanpa kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam usahatani padi sawah mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
10. Biaya sosial merupakan bentuk seluruh harga bayangan atau harga internasional dari produksi Beras yang digunakan petani baik input pasar tradable maupun dengan menggunakan kebijakan.
11. Biaya produksi Beras merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam usaha komoditas Beras dalam dalam satu kali musim tanam. Yang merupakan hasil perkalian antara harga input dengan jumlah input yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).
12. Penerimaan petani adalah hasil perkalian antara jumlah produksi padi sawah dengan harga jual beras yang diterima petani.
13. Pendapatan petani yaitu hasil penerimaan dari usahatani beras yang dikurangi dengan total biaya variabel dan biaya tetap tunai.
14. *Privat Profitability* (keuntungan finansial) merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya dalam privat.
15. Keuntungan sosial (*social profitability*) merupakan selisih antara penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani.

16. Efek divergensi merupakan antara selisih yang melibatkan penerimaan biaya dan keuntungan usahatani yang kemudian diukur dengan harga aktual/privat dengan yang diukur dengan sosial.
17. Keunggulan komparatif adalah pengukuran daya saing usahatani yang dihitung atas harga bayangan atau harga sosial disuatu negara.
18. Keunggulan kompetitif adalah pengukuran daya saing usahatani yang dihitung atas harga pasar dan nilai uang resmi yang berlaku saat ini.